

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Siti Rohana¹, Rano Asoka²

¹STIE Rahmanyah Sekayu, Sekayu, 2018anasky@gmail.com

²STIE Rahmanyah Sekayu, Sekayu, ranoasoka09@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to determine the effect of Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) on the Regional Expenditure of the Government of Musi Banyuasin Regency. The types and sources of data used by the author in this study were secondary data. In this study, the author used quantitative analysis techniques. The quantitative analysis technique used by the author in this study was by testing the hypothesis. This test was used to determine whether the independent variable significantly influences the dependent variable. The results of the study stated that based on the F test it could be concluded that the regional own-source revenue, general allocation funds and special allocation funds together had an influence on regional expenditure. This was because the calculated F value of 6.758 > from the F value of the table 6.608 and based on the t test it could be concluded that the original regional revenue, general allocation funds and special allocation funds partially had an influence on regional spending. This was because the value of t arithmetic local revenue to regional expenditures amounted to 5.204, general allocation funds to regional expenditures amounted to 2.951 and special allocation funds to regional expenditures amounted to 2.968 greater than t table that amounted to 2.105.

Keywords : PAD, DAU, DAK and Regional Expenditures

PENDAHULUAN

Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Tujuan program otonomi daerah adalah untuk menciptakan kehidupan politik yang lebih demokratis, menciptakan sistem yang lebih menjamin pemerataan dan keadilan, memungkinkan setiap daerah menggali potensi natural dan kultural yang dimiliki sesuai karakteristik di daerah masing-masing, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien. Otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Pemerintah daerah dapat terselenggara karena adanya dukungan berbagai faktor

sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. Faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya *financial* bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintah daerah. Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan kebijakan penganggaran yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Apalagi dengan adanya otonomi daerah pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara baik dan efektif.

Kabupaten Musi Banyuasin adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dengan ibu kota Kota Sekayu yang memiliki luas wilayah $\pm 14.265,96$ km² yang terbentang pada lokasi 1,3° - 4° LS, 103° - 105° BT, di Kabupaten Musi Banyuasin pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintahan daerah di Indonesia bidang keuangan daerah adalah relatif kecilnya kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain, peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak mendominasi susunan APBD. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah, baik pendapatan asli daerah maupun pendapatan lainnya. Serta dengan mengoptimalkan penerimaan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Berikut ini adalah data tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 sampai dengan 2019:

**Tabel 1. PAD, DAU dan DAK Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2015 sampai 2019 (Dalam Rupiah)**

Thn	PAD	% Kenaikan/ Penurunan PAD	DAU	% Kenaikan/ Penurunan DAU	DAK	% Kenaikan/ Penurunan DAK
2015	181.795.444.466		131.033.381.000		1.977.700.000	
2016	169.012.416.526	-7,03	324.837.504.000	147,90	168.102.803.675	8.399,9
2017	209.410.035.753	23,90	344.295.499.000	5,99	220.597.682.962	31,2
2018	210.238.037.283	0,40	370.826.979.000	7,71	258.339.719.486	17,1
2019	286.594.847.515	36,32	397.430.383.000	7,17	300.109.018.487	16,2

Sumber : BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, 2020, data diolah.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan asli daerah dari Tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami *fluktuasi*. Hal ini dikarenakan adanya penambahan jumlah pajak daerah di Kabupaten Musi Banyuasin sehingga mengakibatkan penambahan penerimaan pajak daerah, penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dari tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan yang signifikan sedangkan penerimaan dari retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami naik turun

atau *fluktuasi*. Realisasi penerimaan dana alokasi umum dari Tahun 2015 sampai dengan 2019 selalu mengalami peningkatan. Dimana peningkatan terbesar terjadi di Tahun 2016 dengan persentase sebesar 147,90% dan peningkatan terkecil pada Tahun 2017 dengan persentase sebesar 5,99%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin masih tergantung dengan pemerintah pusat. Realisasi dana alokasi khusus dari Tahun 2015 sampai 2019 mengalami peningkatan dimana peningkatan terbesar terjadi di Tahun 2016 dengan persentase sebesar 8.399,9% dan peningkatan terkecil pada Tahun 2019 dengan persentase sebesar 16,2%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin masih tergantung dengan pemerintah pusat.

Pendapatan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin baik dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus memiliki kontribusi terhadap belanja daerah. kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Kabupaten Musi Banyuasin dari Tahun 2015 sampai dengan 2018 selalu mengalami penurunan dan pada Tahun 2019 mengalami peningkatan, kontribusi dana alokasi umum terhadap belanja daerah Kabupaten Musi Banyuasin dari Tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami *fluktuasi*, sedangkan kontribusi dana alokasi khusus terhadap belanja daerah Kabupaten Musi Banyuasin dari Tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami *flukuasi*. Hal ini disebabkan karena penerimaan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tidak sebanding dengan belanja daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Ketidaksebandingan tersebut karena dalam pengalokasian belanja daerah tidak hanya memperhatikan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus saja tetapi juga ada faktor lainnya yaitu dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak dan lain-lain pendapatan asli daerah.

METODE PENELITIAN

Operasionalisasi Variabel

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu dengan cara menganalisa data dengan menggunakan angka-angka berdasarkan perhitungan matematis. Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau X_1 , Dana Alokasi Umum (DAU) atau X_2 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) atau X_3 dan variabel terikat, yaitu belanja daerah. Kriteria pengukuran terhadap masing-masing variabel penelitian sesuai indikator sebagai berikut:

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel Penelitian

No.	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_1)	Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu.	a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah	Rasio

2	Dana Alokasi Umum (DAU) (X ₂)	DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi	Besarnya jumlah DAU yang diberikan pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.	Rasio
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) (X ₃)	Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.	Besarnya jumlah DAK yang diberikan pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.	Rasio
4	Belanja Daerah (Y)	Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.	1. Belanja Langsung 2. Belanja Tidak Langsung	Rasio

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi ini digunakan untuk memperkirakan nilai dari variabel tidak bebas atau belanja daerah (Y) pada nilai variabel bebas atau pendapatan asli daerah (X₁), dana alokasi umum (X₂) dan dana alokasi khusus (X₃), sehingga dapat diketahui berapa besar variabel lainnya. Setiap perubahan variabel bebas (X) akan diimbangi dengan perubahan variabel tidak bebas (Y). Adapun hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 16.00 for windows adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5.790E11	1.293E12		-.448	.732
	PAD	20.808	5.379	1.123	3.869	.161
	DAU	.509	1.504	.105	.339	.792
	DAK	16.417	16.066	.353	1.022	.493

a. Dependent Variable: Belanja_Daerah

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = -5,790.000.000 + 20,808 X_1 + 0,509 X_2 + 16,417 X_3 + e$$

Persamaan regresi linear berganda ini dapat diartikan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar -5,790.000.000, artinya jika pendapatan asli daerah (X_1), dana alokasi umum (X_2) dan dana alokasi khusus (X_3) nilainya adalah Rp. 0,- maka belanja daerah (Y) nilainya negatif yaitu sebesar Rp. -5,790.000.000.
2. Koefisien variabel pendapatan asli daerah (X_1) sebesar 20,808, artinya jika pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 1,- maka belanja daerah (Y) akan mengalami kenaikan sebesar Rp. 20,808. Koefisien bernilai positif artinya hubungan positif antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah, semakin besar penerimaan pendapatan asli daerah maka semakin tinggi anggaran belanja daerah.
3. Koefisien variabel dana alokasi umum (X_2) sebesar 0,509, artinya jika dana alokasi umum mengalami kenaikan sebesar Rp. 1,- maka belanja daerah (Y) akan mengalami kenaikan sebesar Rp. 0,509. Koefisien bernilai positif artinya hubungan positif antara dana alokasi umum dengan belanja daerah, semakin besar penerimaan dana alokasi umum maka semakin tinggi anggaran belanja daerah.
4. Koefisien variabel dana alokasi khusus (X_3) sebesar 16,417, artinya jika dana alokasi khusus mengalami kenaikan sebesar Rp. 1,- maka belanja daerah (Y) akan mengalami kenaikan sebesar Rp. 16,417. Koefisien bernilai positif artinya hubungan positif antara dana alokasi khusus dengan belanja daerah, semakin besar penerimaan dana alokasi khusus maka semakin tinggi anggaran belanja daerah.

Hasil regresi linear berganda di atas menunjukkan bahwa variabel bebas pendapatan asli daerah (X_1), dana alokasi umum (X_2) dan dana alokasi khusus (X_3) berpengaruh positif terhadap variabel terikat yakni belanja daerah (Y).

Uji Hipotesis : Hasil Uji Determinasi (R^2)

Hasil nilai *adjusted R-Square* dari regresi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh pendapatan asli daerah (X_1), dana alokasi umum (X_2) dan dana alokasi khusus (X_3) terhadap belanja daerah (Y). Berikut ini adalah data tentang hasil uji determinasi (R^2):

Tabel 4. Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate
1	.976 ^a	.953	.812	3.366E11

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: Belanja_Daerah

Sumber : Oputput SPSS, Tahun 2020, data diolah

Berdasarkan Tabel 4 di atas diperoleh angka R sebesar 0,976. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara pendapatan asli daerah (X_1), dana alokasi umum (X_2) dan dana alokasi khusus (X_3) dengan variabel terikat yakni belanja daerah (Y). Karena nilai R berada diantara 0,80 sampai dengan 1,00 dengan interpretasi koefisien korelasi sangat kuat. Koefisien determinasi yang dilihat dari nilai R-Square sebesar 0,953 hal ini berarti 95,30% variasi belanja daerah dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independent yaitu pendapatan asli daerah (X_1), dana alokasi umum (X_2) dan dana alokasi khusus (X_3). Sedangkan sisanya 4,70% dijelaskan sebab lain diluar variabel yaitu dana bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Uji Secara Simultan (Uji F)

Untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama diuji dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan regresi secara simultan diperoleh sebagai berikut :

Tabel 5. Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.296E24	3	7.655E23	6.758	.0274 ^a
	Residual	1.133E23	1	1.133E23		
	Total	2.410E24	4			

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: Belanja_Daerah

Sumber : Oputput SPSS, Tahun 2020, data diolah

Berdasarkan Tabel 11 di atas dapat dilihat bahwa F hitung sebesar 6,758. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara bersama-sama terhadap belanja daerah dengan menggunakan F hitung, maka kita harus membandingkan antara F hitung dan F tabel. Apabila F hitung > F tabel, maka variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja daerah. Untuk mengetahui nilai F tabel, maka dapat digunakan persamaan sebagai berikut: Df = 5 yaitu 6,608. Pengujian pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya dilakukan dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai F hitung sebesar 6,758. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,274, maka diperoleh nilai F hitung 6,758 > dari F tabel 6,608. Maka H_0 ditolak dan menerima H_a . Hal ini berarti bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah.

Uji Secara Parsial (Uji t) : Uji PAD terhadap Belanja Daerah

Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah digunakan uji t. Dari hasil pengujian analisis regresi sebagaimana lampiran diketahui nilai t-hitung sebagai berikut :

Tabel 6. Uji t Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.560E11	3.779E11		1.736	.181
	PAD	17.583	3.379	.949	5.204	.014

a. Dependent Variable: Belanja_Daerah

Sumber : Oputput SPSS, Tahun 2020, data diolah

Berdasarkan Tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa t hitung sebesar 5,204. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah dengan menggunakan t hitung, maka kita harus membandingkan antara t hitung dan t tabel. Apabila t hitung > t tabel, maka variabel produk pendapatan asli daerah punya pengaruh terhadap variabel belanja daerah. Untuk mengetahui nilai t tabel, maka dapat dilihat dari tabel statistik dengan df = 5, yaitu sebesar 2,015. Perbandingan t hitung dan t table dapat kita lihat bahwa nilai t hitung > dari nilai t tabel, yakni 5,204 > 2,015. Jadi berdasarkan perbandingan nilai t hitung dan t tabel, dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah. Berdasarkan tingkat signifikansi, apabila tingkat signifikansi berada dibawah atau lebih kecil dari 5%, maka variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen dan begitupula sebaliknya. Dari hasil penelitian diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,014. Jadi dapat dikatakan bahwa tingkat signifikansi variabel pendapatan asli daerah berada dibawah standar, artinya variabel ini memiliki pengaruh terhadap variabel belanja daerah

Uji DAU terhadap Belanja Daerah

Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah digunakan uji t. Dari hasil pengujian analisis regresi sebagaimana lampiran diketahui nilai t-hitung sebagai berikut :

Tabel 7. Uji t Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.987E12	6.731E11		.913	.429
	DAU	2.252	2.466	.466	2.951	.020

a. Dependent Variable: Belanja_Daerah

Sumber : Oputput SPSS, Tahun 2020, data diolah

Berdasarkan Tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa t hitung sebesar 2,951. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah dengan menggunakan t hitung, maka kita harus membandingkan antara t hitung dan t tabel. Apabila t hitung > t tabel, maka variabel dana alokasi umum punya pengaruh terhadap variabel belanja daerah. Untuk

mengetahui nilai t tabel, maka dapat dilihat dari tabel statistik dengan $df = 5$, yaitu sebesar 2,015. Perbandingan t hitung dan t tabel dapat kita lihat bahwa nilai t hitung $>$ dari nilai t tabel, yakni $2,951 > 2,015$. Jadi berdasarkan perbandingan nilai t hitung dan t tabel, dapat disimpulkan bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah. Berdasarkan tingkat signifikansi, apabila tingkat signifikansi berada dibawah atau lebih kecil dari 5%, maka variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen dan begitupula sebaliknya. Dari hasil penelitian diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,020. Jadi dapat dikatakan bahwa tingkat signifikansi variabel dana alokasi umum berada dibawah standar, artinya variabel ini memiliki pengaruh terhadap variabel belanja daerah.

Uji DAK terhadap Belanja Daerah

Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah digunakan uji t. Dari hasil pengujian analisis regresi sebagaimana lampiran diketahui nilai t-hitung sebagai berikut :

Tabel 8. Uji t Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.514E12	1.184E12		.890	.259
DAK	21.243	23.860	.457	2.968	.016

a. Dependent Variable: Belanja_Daerah

Sumber : Oputput SPSS, Tahun 2020, data diolah

Berdasarkan Tabel 14 di atas dapat dilihat bahwa t hitung sebesar 2,968. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja daerah dengan menggunakan t hitung, maka kita harus membandingkan antara t hitung dan t tabel. Apabila t hitung $>$ t tabel, maka variabel dana alokasi umum punya pengaruh terhadap variabel belanja daerah. Untuk mengetahui nilai t tabel, maka dapat dilihat dari tabel statistik dengan $df = 5$, yaitu sebesar 2,015. Perbandingan t hitung dan t table dapat kita lihat bahwa nilai t hitung $>$ dari nilai t tabel, yakni $2,968 > 2,015$. Jadi berdasarkan perbandingan nilai t hitung dan t tabel, dapat disimpulkan bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah. Berdasarkan tingkat signifikansi, apabila tingkat signifikansi berada dibawah atau lebih kecil dari 5%, maka variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen dan begitupula sebaliknya. Dari hasil penelitian diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,016. Jadi dapat dikatakan bahwa tingkat signifikansi variabel dana alokasi khusus berada dibawah standar, artinya variabel ini memiliki pengaruh terhadap variabel belanja daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara Parsial terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara statistik dapat terlihat dengan jelas bahwa secara parsial (individu) semua variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Pengaruh yang diberikan kedua variabel bebas tersebut bersifat positif artinya semakin besar penerimaan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus maka semakin besar belanja daerah yang dianggarkan. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Penelitian ini dimaksud untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah. Hasil pengujian hipotesis (H1) telah membuktikan terdapat pengaruh antara pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar 5,204 dengan taraf signifikan 0,014. Hasil nilai t hitung > tabel ($5,204 > 2,015$), maka H_0 ditolak yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menerima H_a dan menolak H_0 . Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Artinya bahwa ada pengaruh antara variabel pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk variabel pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Pada penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Syukriy dan Halim Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara positif terhadap belanja daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Penelitian ini dimaksud untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Hasil pengujian hipotesis (H2) telah membuktikan terdapat pengaruh antara dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar 2,951 dengan taraf signifikan 0,020. Hasil nilai t hitung > tabel ($2,951 > 2,015$), maka H_0 ditolak yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menerima H_a dan menolak H_0 . Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Artinya bahwa ada pengaruh antara variabel dana alokasi umum terhadap belanja daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk variabel dana alokasi umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Pada penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Syukriy dan Halim Tahun 2014 yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh secara positif terhadap belanja daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Penelitian ini dimaksud untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara dana alokasi khusus terhadap belanja daerah. Hasil pengujian hipotesis (H3) telah membuktikan terdapat pengaruh antara dana alokasi khusus terhadap belanja daerah. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar 2,968 dengan taraf signifikan 0,016. Hasil nilai t hitung > tabel ($2,968 > 2,015$), maka H_0 ditolak yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menerima H_a dan menolak H_0 . Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Artinya bahwa ada pengaruh antara

variabel dana alokasi khusus terhadap belanja daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk variabel dana alokasi khusus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Pada penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar Tahun 2013 yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara Simultan terhadap Belanja Daerah

Penelitian ini dimaksud untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara simultan terhadap belanja daerah. Hasil penelitian dari pengujian pengaruh variabel bebas secara bersama sama terhadap variabel terikatnya dilakukan dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai F hitung = 6,758. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, maka diperoleh nilai F hitung $6,758 >$ dari 6,608. Maka H_0 ditolak dan menerima H_a . Hal ini berarti bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa secara simultan variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Besarnya pengaruh tersebut termasuk kecil, karena pendapatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tidak hanya berasal dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus melainkan juga bersumber dari pendapatan lainnya seperti dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah serta dari penerimaan pembiayaan yang juga berpengaruh dalam penentuan anggaran belanja daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan uji t dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara parsial mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini dikarenakan nilai t hitung pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah sebesar 5,204, dana alokasi umum terhadap belanja daerah sebesar 2,951 dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah sebesar 2,968 lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 2,105. Berdasarkan uji F dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini dikarenakan nilai F hitung $6,758 >$ dari nilai F tabel 6,608. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin lebih mengoptimalkan usaha dalam meningkatkan pendapatan daerahnya dan memperketat pengawasan agar tidak terjadi kebocoran terutama pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Karena Pendapatan Asli Daerah merupakan gambaran dalam kemandirian daerah.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebaiknya melakukan upaya pengoptimalan yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang secara potensial masih sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang baik/mandiri. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebaiknya melakukan langkah optimalisasi pemungutan pendapatan asli daerah terkhusus di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan dapat mengalokasikan belanja daerah pada program/kegiatan yang dapat meningkatkan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta dapat merangsang terciptanya sumber

pendapatan baru. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebaiknya melakukan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPD) sesuai jadwal agar Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak terpotong sehingga APBD Kabupaten Musi Banyuasin tidak mengalami penurunan dan menghambat pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin. BUMD sebaiknya melakukan optimalisasi kinerja agar dapat meningkatkan laba sehingga hal ini akan meningkatkan pendapatan asli daerah yang nantinya juga akan meningkatkan kinerja keuangan daerah.

REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Rhineka Cipta
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi. *Jurnal Akuntansidan Keuangan Sektor Publik*, Vol 08 No. 01. February 2007. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Mayriski, Nancy Siregar. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jambi. *Skripsi Akuntansi. Tidak dipublikasikan*. Universitas Sumatera Utara. Medan
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
_____, Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Priyatno, Dwi. 2009. *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS dan Tanya Jawab Ujian Pdadara*. Yogyakarta: Gava Media.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
_____, Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- Sekaran, Uma. 2009. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*, Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Pajak Daerah &Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syukriy, Abdullah & Abdul Halim. (2004). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. Simposium Nasional Akuntansi VI, hal. 1140-1159